

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu tolok ukur atas gambaran kegiatan, kemajuan, serta bentuk pertanggungjawaban. Laporan keuangan secara umum memiliki tujuan untuk membandingkan kinerja di tahun lalu dan memudahkan pengguna yang membutuhkan. Laporan Keuangan Pemerintah sesuai PSAP Nomor 1, menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan sebagai wujud dari akuntabilitas. Sejalan dengan tujuan LK Pemerintah, berdasar Romney & Steinbart (2018), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) menjadi sistem yang andal dalam membantu pengumpulan data kemudian disimpan secara integrasi dan diolah menjadi informasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, terdapat beberapa faktor yang menjadi isu/anomali dalam akuntabilitas dan keterbukaan untuk mewujudkan *good governance* (Rahmadania, 2015). Isi laporan keuangan menjadi titik yang menentukan hasil pemeriksaan/reviu berupa opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dari hasil LHP BPK 2020 atas uji proses verifikasi Dana BOS oleh KPPN dengan aplikasi OM SPAN masih sebatas perbandingan total nilai penyaluran dengan jumlah sekolah, hal ini dikarenakan keterbatasan menu

verifikasi dan petunjuk teknis. Berdasarkan opini BPK, dalam hasil audit LKBUN Pusat di empat tahun terakhir mendapat opini wajar pada semua hal yang material. Pada tahun 2015 LKPP menghasilkan opini WDP, salah satu pengecualian tersebut timbul akibat temuan 2014 yang juga pernah terjadi pada tahun 2013 yaitu ketidakakuratan pencatatan dengan hasil fisik SAL. Untuk tahun 2013 Menteri Keuangan merekomendasikan mekanisme validitas dan penerapan sanksi. Tahun 2014, BPK menyarankan adanya pengendalian internal untuk memastikan kesesuaian saldo kas pada neraca KPPN. Yang kemudian pada lima tahun terakhir dari 2016-2020 mengalami peningkatan kualitas LK sehingga mendapatkan opini WTP dari BPK.

Dalam penelitian Wati. M (2019) dijelaskan terdapat beberapa satker yang mengalami kendala sehingga terjadi keterlambatan pelaporan LK oleh KPPN. Salah satu hal penting untuk kelancaran penyusunan LK adalah sumber daya manusia. Dengan adanya SDM yang berkompeten disertai pembagian tugas yang tertata dapat menghindari kendala kerja. Selain itu disebutkan lagi di dalamnya, pengendalian internal dan bantuan sarana pendukung turut membantu petugas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan komponen Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) yaitu pengguna sistem sebagai SDM dibantu dengan adanya infrastruktur Teknologi Informasi. Penelitian oleh Sejati (2018), menemukan bahwa dalam upaya mengurangi *error/fraud* dibutuhkan adanya peningkatan kinerja dan kompetensi dari SDM yang dimiliki. Menurutnya, kinerja tiap individu berpengaruh besar dalam mengoptimalkan kinerja organisasi.

SIAP berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan di pemerintah. SIAP terdiri dari SDM dan peralatan pada formasi pemerintah yang mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Terdapat 6 komponen dalam SIA di antaranya pengelola sistem, kebijakan prosedur, data yang tersimpan, perangkat lunak untuk membantu mengolah data, teknologi informasi, dan keamanan melalui pengendalian internal. Salah satu LK Pemerintah adalah Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN yang menjadi tanggungjawab KPPN. KPPN merupakan unit vertikal dari DJPb yang termasuk dalam UAKBUN-Daerah.

Penyusunan LKBUN-Daerah dibantu oleh sistem aplikasi bernama SPAN. Selain SPAN, dalam Deviani (2021) pada tingkat Kuasa BUN terdapat aplikasi e-rekon&LK berbasis *web* yang memfasilitasi proses rekonsiliasi satker dengan KPPN sebagai Kuasa BUN. Adanya siklus yang sistematis dan aplikasi yang membantu penugasan, dengan ini diharapkan mampu membuat susunan LK yang baik. Dalam Mulyono *et al.* (2021) LK yang sesuai sangat menentukan kualitas dari informasi yang disajikan.

Dari penelitian sebelumnya, masih sedikit ditemukan yang membahas penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat Kuasa BUN dari aspek atau komponen SIA. Mengingat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN PADA KPPN TANJUNGPINANG”. Karya tulis ini diharapkan bermanfaat terkhusus bagi KPPN Tanjungpinang dalam meningkatkan proses Penyusunan Laporan Keuangan

tingkat Kuasa BUN, kepentingan penelitian di masa yang akan datang, dan penulis sendiri dalam pengembangan ilmu yang didapat selama penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai penjelasan latar belakang di atas. Rumusan masalah yang dapat dikaji untuk karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi siklus penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang?.
2. Bagaimana komponen SIA dalam proses penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang?.
3. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang?.
4. Bagaimana cara menangani kendala dalam penyusunan LKBUN-Daerah oleh KPPN Tanjungpinang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang terurai di atas, tujuan atas karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan atas siklus penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang.
2. Untuk meninjau komponen Sistem Informasi Akuntansi dalam penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang.
3. Untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala saat melakukan proses penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang.

4. Untuk mengetahui bagaimana KPPN Tanjungpinang menangani kendala dalam proses penyusunan LKBUN-Daerah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam karya tulis ini berfokus pada siklus Penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang sebagai objek. Adapun batasan pembahasan karya tulis ini berupa siklus penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang khusus Tahun 2020 dan Tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan disusunnya karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan berbagai manfaat pengetahuan serta wawasan, baik itu kepada pembaca, KPPN Tanjungpinang, maupun masyarakat luas. Manfaat tersebut, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi keilmuan

Dengan hasil karya tulis ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang dilakukan selama penelitian.

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan hasil karya tulis ini, penulis berharap pada kemudian hari dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis

Dengan hasil karya tulis ini, penulis berharap dapat menambah wawasan terutama pengalaman atas peninjauan selama proses penelitian karya tulis ini.

b. Bagi KPPN Tanjungpinang

Dengan hasil karya tulis ini, penulis berharap dapat digambarkan sebagai wujud kontribusi terhadap KPPN Tanjungpinang dalam meninjau proses penyusunan LKBUN-Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan, penulis memberikan gambaran inti atas permasalahan yang pernah terjadi sehingga penulis berniat mengambil topik ini. Adapun isi dari bab ini terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dari penulisan, ruang lingkup pengkajian, manfaat dari karya tulis, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam landasan teori, penulis menjelaskan teori, peraturan, jurnal/penelitian terdahulu mengenai BUN, SAPP yang terbagi menjadi SAI (satker) dan SiAP (Pemerintah/KPPN), sistem dan unit pelaporan, LKBUN, Kualitas suatu LK, KPPN Tipe A1, Sistem Informasi Akuntansi (SIA), Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP), dan kualitas informasi yang diberikan dalam LK.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam penyusunan KTTA ini penulis mengambil data primer dari KPPN Tanjungpinang dan data sekunder dari peraturan serta hasil pembelajaran kuliah. Adapun data yang dibutuhkan seperti LKBUN-D KPPN Tanjungpinang Tahun 2020 dan 2021 baik *unaudited* maupun *audited*, hasil penilaian LKBUN-D oleh Kanwil DJPb Kepri, pihak yang menyusun LKBUN-D, data yang dibutuhkan dalam penyusunan LKBUN-D, tinjauan siklus penyusunan LKBUN-D sesuai komponen SIA, kontrol internal, kendala, dan mitigasi oleh KPPN Tanjungpinang dalam proses penyusunan LKBUN-D. Adapun metode pengumpulan data penulis lakukan dengan melakukan studi kepustakaan, peninjauan secara langsung, dan hasil wawancara.

BAB IV SIMPULAN

Dalam simpulan, penulis memberikan uraian singkat sebagai inti dari keseluruhan pembahasan karya tulis ini. Simpulan bisa didapat melalui perbandingan proses nyata di KPPN antara peraturan yang berlaku dengan teori yang dipelajari selama perkuliahan serta permasalahan yang dikaitkan dengan saran dari pelaksanaan proses penyusunan LKBUN-Daerah KPPN Tanjungpinang.